



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

TAHUN 2024



www.bprdatagitamustika.co.id



(0251) 8647375



www.datagita_mustika@yahoo.com

DAFTAR ISI

A. LATAR BELAKANG-----	3
B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA-----	5
C. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN-----	6
D. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)-----	6

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang -----	8
1.2. Ruang Lingkup -----	8
1.3. Tujuan -----	9

BAB II PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

2.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi -----	10
2.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Komisaris -----	13
2.3. Penanganan Benturan Kepentingan -----	18
2.4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern -----	18
2.5. Penerapan Manajemen Resiko, termasuk sistem pengendalian Intern -----	19
2.6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Related Party</i>) atau BMPK -----	19
2.7. Rencana Strategis Bank -----	19
2.8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank -----	22

BAB III TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

3.1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----	23
3.2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----	23
3.3. Paket atau kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi -----	23
3.4. <i>Share Option</i> -----	25
3.5. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah -----	25
3.6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris -----	26
3.7. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>internal Fraud</i>) -----	26
3.8. Permasalahan Hukum -----	26
3.9. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan -----	27
3.10. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik -----	27

BAB IV KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

LAMPIRAN: Hasil Self Assesment BPR Datagita Mustika

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA – GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BPR DATAGITA MUSTIKA
TAHUN 2024**

A. LATAR BELAKANG

Di tengah kondisi ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global, perekonomian Indonesia tercatat tetap kuat dan stabil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2023 tetap tumbuh sebesar 4,94% (yoy), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai sebesar 5,17% (yoy). Pemerintah tetap optimis untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% hingga penghujung tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya didukung oleh kondisi sektor keuangan tahun 2023 yang dinilai stabil dan resilien tercermin dari pertumbuhan sektor pasar modal, perbankan dan industri keuangan non bank. Di sektor pasar modal, IHSG posisi 30 November 2023 tercatat menguat sebesar 3,36% secara *ytd* ke level Rp7.080,74. Untuk sektor perbankan, kinerja intermediasi perbankan posisi Oktober 2023 tetap terjaga dengan nominal penyaluran kredit sebesar Rp6.902,98 triliun (tumbuh 8,99% secara *yoy*) dan *penghimpunan* Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai sebesar Rp8.198,80 triliun (tumbuh 3,43% secara *yoy*). Adapun untuk sektor *keuangan non bank*, akumulasi pendapatan premi Perusahaan Asuransi posisi Oktober 2023 mencapai sebesar Rp264,23 triliun (tumbuh 3,54% secara *yoy*) dan dari *industri Perusahaan Pembiayaan*, piutang pembiayaan mencapai Rp463,12 triliun (tumbuh sebesar 15,02% secara *yoy*). Capaian pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan tahun 2023 di atas, tentu patut kita syukuri bersama. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan kuat di tengah perlambatan perekonomian serta tingginya ketidakpastian global.

Menjelang datangnya tahun 2024, perekonomian dunia diperkirakan masih terus dibayangi berbagai kondisi ketidakpastian global mulai dari risiko pertumbuhan ekonomi China dan Amerika yang melemah, geopolitik perang Ukraina-Rusia dan konflik Palestina-Israel, fragmentasi ekonomi (antitesis dari integrasi ekonomi), volatilitas harga komoditas, ancaman perubahan iklim, kontraksi PMI Manufaktur global, serta meningkatnya harga minyak dunia. Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan IMF pada 10 Oktober 2023, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 akan mencapai sebesar 2,9% turun 0,1% dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 yang mencapai sebesar 3%. Kondisi global tersebut, tentu dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia apabila Pemerintah, regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya tidak menyiapkan langkah antisipatif.

Berdasarkan proyeksi dari beberapa Lembaga, sebagian besar memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 masih tetap stabil dikisaran 5%, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global di atas yang mencapai sebesar 2,9%. Beberapa Lembaga yang telah memproyeksikan besaran pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2024 antara lain World Bank sebesar 4,9%, ADB dan IMF sebesar 5,0% serta OECD sebesar 5,2%. Adapun Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2%

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, selain menyiapkan langkah antisipatif atas kondisi eksternal yaitu ketidakpastian global, kita juga harus mewaspadai tantangan dari dalam negeri/domestik. Tantangan tersebut antara lain kenaikan suku bunga dalam negeri, ketahanan pangan nasional, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kondisi politik dalam negeri menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, perlu kita gali lebih mendalam langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan yang akan hadir serta bagaimana mengoptimalkan peluang yang muncul di tahun 2024. Hal tersebut sangat penting guna mewujudkan terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan demi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan diskusi dan pembahasan bersama narasumber yang ahli di bidangnya baik dari regulator, pelaku industri dan pakar ekonomi.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan pada 2024 di kisaran 10% hingga 12%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai proyeksi tersebut bisa tercapai. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan ada sejumlah pertimbangan kenapa proyeksi pertumbuhan kredit di level 10% hingga 12% bisa tercapai. pertumbuhan perekonomian juga konsisten di atas 5%. Selain itu, kegiatan perekonomian terus bergerak dibandingkan pada periode-periode sebelumnya. "Sebelum terjadi pandemi Covid-19. pertumbuhan kredit hanya 6,08%, masa pandemi sudah negatif, tapi kita sekarang pertumbuhan kredit di level 8,99%.

Pada 2024, optimistis pertumbuhan kredit akan mencapai kisaran 10% hingga 12%, lebih tinggi dari perkiraan pada tahun ini pada kisaran 9% hingga 11%. "Pertumbuhan kredit akan meningkat ke 10%-12% pada 2024 dan kemudian akan meningkat kembali ke 11%-13% pada 2025, Sejalan dengan pertumbuhan kredit, BI memperkirakan perekonomian Indonesia akan tetap berdaya tahan dan tumbuh kuat pada 2024, di tengah ketidakpastian global yang masih sangat tinggi.

Perekonomian dalam negeri pada 2024 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,7% hingga 5,5% dan akan meningkat lebih tinggi pada 2025. ekonomi Indonesia 2024 dan 2025 akan menunjukkan ketahanan dan kebangkitan. Pertumbuhan ekonomi akan cukup tinggi pada 4,7%-5,5% pada 2024 dan meningkat pada kisaran 4,8%-5,6% pada 2025, salah satu yang tertinggi di dunia.

Sejumlah bank pun optimistis kredit akan moncer pada tahun depan. "Untuk pertumbuhan ke depan kita lihat juga dari alokasi APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] juga tahun depan untuk infrastruktur cukup besar. Mudah-mudahan itu bisa menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain.

pada dasarnya proyeksi pertumbuhan kredit pada 2024 di kisaran 10% hingga 12% berat bagi perbankan. "Berat, tadinya kita melihat [pertumbuhan kredit] antara 8%-10%, Proyeksi tersebut bisa saja terwujud, asalkan sejumlah syarat bisa terpenuhi. "Syaratnya memang harus ada sektor yang benar akan diarahkan ke mana penyaluran kreditnya.

Sebagai sebuah perusahaan di bidang keuangan, BPR Datagita Mustika tunduk kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan selalu berpedoman pada Lembaga Keuangan resmi yang menjadi induk dari seluruh perusahaan keuangan di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK dan BI secara konsisten melakukan pemantauan terhadap BPR Datagita Mustika baik dari sisi pemantauan risiko dan kinerja perusahaan.

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada BPR Datagita Mustika yang tercermin dari *Governance System* yang mencakup *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Output* pada 9 (Sembilan) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan perinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG.

Penilaian GCG dilakukan dengan metode *self-assessment* berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan resiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*).

Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu :

1. *Transparency*, (transparansi) adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Accountability*, (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
3. *Responsibility*, (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan.
4. *Independency*, (independensi) yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional, tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.
5. *Fairness*, (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan hak - hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola tersebut atau yang lazim disebut dengan Good Corporate Governance, maka berikut adalah Laporan Tata Kelola BPR Datagita Mustika tahun 2023.

B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA

Penyusunan Laporan Tata Kelola ini didasarkan atas:

1. Anggaran Dasar Perusahaan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 18 Mei 2021 berikut segala perubahannya.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
4. Surat Edaran OJK nomor 24/SEOJK.03/2020, tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi BPR.
6. Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 23/POJK/2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

C. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola perusahaan dibuat untuk penerapan check and balance, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola BPR Datagita Mustika terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu :
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Kredit
5. Komite-komite Eksekutif yang membantu pelaksanaan tugas Direksi, yaitu :
 - a. ALCO (Asset and Liability Committee)
 - b. Komite Manajemen Risiko
6. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
7. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
8. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Masing-masing Komite dan satuan-satuan kerja telah memiliki kebijakan, tugas dan tanggung jawab yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi.

D. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)

Tahun 2023 BPR Datagita Mustika kembali melakukan penilaian sendiri atas 11 unsur dalam penerapan Good Corporate Governance, Sebelas unsur tersebut tersebut adalah :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern
9. Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana bisnis BPR
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Hasil akhir penilaian sendiri (self assesment) adalah berupa nilai komposit, dengan nilai '1,4 (satu koma empat) dengan peringkat Sangat Baik”.

Analisis terhadap hasil penilaian sendiri secara ringkas dijabarkan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu

1. Governance Structure (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola)

Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Tata Kelola sudah dilengkapi sesuai dengan ketentuan, yaitu :

- a. Kelengkapan Direksi dan jumlah direksi
- b. Kelengkapan Dewan Komisaris dan jumlah dewan komisaris
- c. Pembentukan Satuan-satuan kerja

Pembentukan Komite Pemantau Risiko, Komite Audit telah ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2017, masing-masing melalui SK Direksi No, O23/SK.DIR/II/2017, dan SK Direksi No.024/SK.DIR/2017 sehingga dapat segera melakukan tugas dan fungsinya dalam mendukung penerapan Good Corporate Governance.

2. Governance Process (Proses Penerapan Tata Kelola)

Keseluruhan infrastruktur Tata Kelola, telah dilengkapi dengan Kebijakan dan Prosedur yang tertuang dalam bentuk Manual, serta penjabaran tugas dan tanggung jawab dalam bentuk Job Profiling yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendukung terlaksana dan terciptanya Tata Kelola perusahaan yang baik,

3. Governance Outcome (Hasil Penerapan Tata Kelola)

Bank telah mematuhi segala ketentuan tentang prinsip kehati-hatian, seperti ketentuan tentang BMPK dan Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik secara berkala.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut.

Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) antara lain adalah keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015

Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penilaian sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. Penanganan benturan kepentingan;
- d. Penerapan fungsi kepatuhan;
- e. Penerapan fungsi audit intern;
- f. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- g. Batas maksimum pemberian kredit;
- h. Rencana bisnis BPR;
- i. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

1.3. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. BPR Datagita Mustika adalah :

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

BAB II
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

2.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi.

2.1.1. Jumlah, Komposisi, kriteria dan Independensi Anggota Direksi Jumlah, Komposisi, kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

Sesuai dengan ketentuan Peraturan POJK BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Susunan komposisi Direksi adalah sebagai berikut :

	NAMA	JABATAN
1	SISWANTO	DIREKTUR UTAMA
2	MIA HERMALIANA	DIREKTUR

Untuk menjaga independensi Direksi, BPR Datagita Mustika sudah memastikan tentang hubungan kekeluargaan, keuangan, kepemilikan saham dan kepengurusan Direksi dengan sesama Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dengan detail sebagai berikut :

A. Hubungan Kekeluargaan

NAMA	JABATAN	DIREKSI	KOMISARIS
SISWANTO	DIREKTUR UTAMA	-	-
MIA HERMALIANA	DIREKTUR	-	-

B. Hubungan Keuangan

NAMA	JABATAN	DIREKSI	KOMISARIS
SISWANTO	DIREKTUR UTAMA	-	-
MIA HERMALIANA	DIREKTUR	-	-

C. Rangkap Jabatan Direksi pada BPR lain, Lembaga Keuangan Non Bank atau Perusahaan lainnya

NAMA	JABATAN	BPR LAIN	LJK NON BANK	LAINNYA
SISWANTO	DIREKTUR UTAMA	-	-	-
MIA HERMALIANA	DIREKTUR	-	-	-

D. Program Pelatihan bagi Direksi

NAMA	JABATAN	PELATIHAN YANG DIKUTI
SISWANTO	DIREKTUR UTAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan, 06 Februari 2023. 2. Webinar Hukum dan Bisnis Legal Outlook 2023, 15 Februari 2023. 3. Webinar Peran BPR pasca UU P2SK untuk Memperkuat Perekonomian Nasional, 23 Februari 2023. 4. Gathering Virtual bersama LPS dan BPRS, 07 maret 2023. 5. Sharing Experience dan Gathering Komisariat Bogor, 18 Mei s/d 20 Mei 2023. 6. Workshop Hukum : Gugat Batal Risalah Lelang, 06 Juni 2023. 7. MUSDA XIII DPD PERBARINDO DKI Jaya & Sekitarnya dan Seminar : “Bank Perekonomian Rakyat Tumbuh Lebih Kuat, Transformasi Lebih Cepat, Mensejahterakan Ekonomi Rakyat”, 08 Juni s/d 09 Juni 2023. 8. Webinar Mengenal Lebih jauh Pengaturan UU P2SK dalam Rangka Penguatan Sektor Perbankan, 22 Juni 2023. 9. Webinar Manajemen Stress di Era Digital, 13 Juli 2023. 10. Webinar LPS, 09 Agustus 2023. Webinar Managing Environmental, Social and Governance Risk and Opportunities, 19 Oktober 2023. 11. Workshop Status Jaminan Pasca Pergantian nama (Nomenlaktur) BPR, 03 November 2023. 12. Webinar How to Overdrive Corporate Performance Through Accounting Practices, 09 November 2023.
MIA HERMALIANA	DIREKTUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi APOLO Modul Laporan Bulanan BPR, 12 Januari 2023. 2. Sosialisasi POJK No.23 thn 2022 tentang BMPK BPR dan BMPD BPRS, 07 maret 2023. 3. Webinar Memperkuat Kompetensi Digital untuk SDM BPR : Keterampilan dan Kemampuan untuk Masa Depan, 11 April 2023. 4. Sharing Experience dan Gathering Komisariat Bogor, 18 Mei s/d 20 Mei 2023.

		<p>5. Webinar Memperkuat Ketahanan Nasional di Industri Jasa Keuangan, 22 Mei 2023.</p> <p>6. Webinar How To Manage Climate Related Risk In Banking industry, 15 juni 2023.</p> <p>7. Pelatihan Penyegaran Sertifikasi Kompetensi Direksi, 21 Juni s/d 23 Juni 2023.</p> <p>8. Webinar Manajemen Stress di Era Digital, 13 Juli 2023.</p> <p>9. Pelatihan Awareness ISO 27001 information Security Management System, 13 Juli 2023.</p> <p>10. Sosialisasi dengar pendapat Rancangan POJK BPR dan BPRS (tematik kelembagaan), 20 September 2023.</p> <p>11. Webinar Managing Environmental, Social and Governance Risk and Opportunities, 19 Oktober 2023.</p> <p>12. Kunci sukses menciptakan Talenta profesional di Sektor Jasa Keuangan, 23 Oktober 2023.</p> <p>13. Workshop Status Jaminan Pasca Pergantian nama (Nomenklatur) BPR, 03 November 2023.</p> <p>14. Webinar How to Overdrive Corporate Performance Through Accounting Practices, 09 November 2023.</p>

1. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan *Kepatutan (Fit and Proper Test)*.
2. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
3. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :
 - A. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - ✓ Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;☐
 - ✓ Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;☐
 - ✓ Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - ✓ Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

- B. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
- ✓ Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ✓ Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 - ✓ Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- C. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup
- ✓ Tidak memiliki kredit macet;
 - ✓ Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

2.1.2. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS Tahunan.
2. RUPS telah menetapkan pembagian tugas dan tanggungjawab setiap anggota Direksi.
3. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
4. Direksi telah mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
5. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern BPR, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

2.2.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris.

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Susunan Komposisi Komisaris

	NAMA	JABATAN
1	MEILA DHARMAYANTI	KOMISARIS UTAMA

Untuk menjaga independensi Komisaris, BPR Datagita Mustika sudah memastikan tentang hubungan kekeluargaan, keuangan, kepemilikan saham dan kepengurusan Komisaris dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham dengan detail sebagai berikut :

A. Hubungan Kekeluargaan

NAMA	JABATAN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
MEILA DHARMAYANTI	KOMISARIS UTAMA		

B. Hubungan Keuangan

NAMA	JABATAN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
MEILA DHARMAYANTI	KOMISARIS UTAMA	-	-

C. Rangkap Jabatan Direksi pada BPR lain, Lembaga Keuangan Non Bank atau Perusahaan lainnya

NAMA	JABATAN	BPR LAIN	LJK NON BANK	LAINNYA
MEILA DHARMAYANTI	KOMISARIS UTAMA	-	-	PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI

1. Komisaris telah memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
2. Komisaris Utama merupakan pemilik dengan persentase kepemilikan sebesar 50,00%
3. Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut.
 - a. Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - ✓ Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - ✓ Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - ✓ Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.☐
 - b. Dewan Komisaris memiliki kompetensi paling kurang mencakup :
 - ✓ Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - ✓ Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - ✓ Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 - c. Anggota Komisaris memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
 - ✓ Tidak memiliki kredit macet;
 - ✓ Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu☐perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan

2.2.2. Tugas, Tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
 - b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 - d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
 - e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - i. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;
 - ii. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
 - g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
 - h. Dewan Komisaris wajib memberitahukan:
 - i. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - ii. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
 - i. Dewan Komisaris harus melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
 - j. Dewan Komisaris wajib membentuk, minimal :
 - i. Komite Audit;
 - ii. Komite Pemantau Risiko.
 - k. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan rapat Dewan Komisaris.
 - l. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk, menjalankan tugasnya secara efektif
 - m. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
 - n. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama sama maupun sendiri - sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua Pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain - lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi.
 - o. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi dan atau jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BPR sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
-

- p. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi dan atau Jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BPR sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- q. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seseorang atau lebih anggota Direksi, jika anggota Direksi tersebut ber buat/bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, merugikan Perusahaan, melalaikan kewajiban dan atau melanggar aturan Perundangan yang berlaku
- r. Dewan Komisaris wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- s. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada konsumen atau nasabah.
- t. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris, yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- u. Agenda rapat Dewan Komisaris adalah membahas hal-hal mengenai :
 - i. rencana bisnis BPR;
 - ii. isu-isu strategis BPR;
 - iii. evaluasi/penetapan kebijakan strategis;
 - iv. evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.
- v. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- w. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- x. Dalam melakukan fungsinya sebagai Pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
- y. Dalam melakukan fungsinya sebagai Pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
- z. Permintaan penjelasan dapat dilakukan dalam rapat dengan Direksi Keputusan rapat wajib dituangkan didokumentasikan dengan baik.

2.2.3. Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Regulasi, agenda rapat Dewan Komisaris antara lain:

- a. Rencana Bisnis BPR
- b. Isu - isu Strategis BPR
- c. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis,
- d. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan rapat dewan dengan detail sebagai berikut :

TEMPAT DAN TANGGAL RAPAT	MATERI RAPAT
Bogor, 06 April 2023	1. Review Kinerja direksi tahun 2022 2. NPL 3. Penyaluran Kredit 4. APU PPT
Bogor, 3 Juli 2023	1. Review Kinerja 3 bulan 2. Pemenuhan Modal Inti Minimum 3. Penyaluran Kredit 4. Penghimpunan Dana

2.2.4. Matriks Kehadiran Dewan Komisaris

NAMA	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN
Meila Dharmayanti	2	100%
Taufik	2	100%

2.2.5. Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris

REMUNERASI & FASILITAS LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (12 BULAN)
Gaji	Rp. 121.000.000,-
Tunjangan Rutin	-
Tunjangan Perumahan	-
Fasilitas Kendaraan	-

2.2.6. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- ✓ Persetujuan RBB tahun 2023.
- ✓ Penyaluran kredit yang sehat dan maksimal
- ✓ Penyelesaian NPL
- ✓ Penambahan pangsa pasar
- ✓ Rekomendasi lainnya yang bertujuan untuk kemajuan BPR .

2.2.7. *Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris*

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang diantaranya mengatur tentang :

- a. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
- b. Waktu Kerja
- c. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
- d. Nilai dan Etika Kerja
- e. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
- f. Aspek Transparansi dan Larangan
- g. Pelatihan bagi Dewan Komisaris, dan
- h. Rapat Dewan Komisaris

2.3. **Penanganan Benturan Kepentingan**

Sampai dengan saat ini bank belum menangani penanganan benturan kepentingan dikarenakan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sampai saat ini bank selalu berusaha untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

BPR juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pengurus dan pegawai BPR. Untuk itu BPR telah membuat pedoman penanganan benturan kepentingan.

2.4. **Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.**

2.4.1. *Fungsi Kepatuhan*

Penunjukkan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang diangkat oleh Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagai penanggung jawab fungsi kepatuhan

Direktur yang bertanggungjawab pada fungsi kepatuhan untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan OJK dan BI, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2. *Fungsi Audit Internal*

Pelaksanaan fungsi audit internal yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.

Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada pedoman budaya anti fraud, seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (yang mencakup pemantauan harian, dan Mingguan), dan Audit Tahunan

Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tembusan direktur yang bertanggungjawab pada fungsi kepatuhan.

Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

2.4.3. Fungsi Audit Eksternal

Untuk penerapan Fungsi Audit Eksternal, PT BPR Datagita Mustika telah menunjuk Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik (KAP) Gindo P. Parluhutan, AP Gindo P Tampubolon, Ak, CA, CPA, STTD AP-05/NB.122/2021, dengan no register AP 0585 yang telah terdaftar dan memiliki ijin dari Departemen Keuangan dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk BPR KAP tersebut tidak mempunyai hubungan bisnis maupun keterkaitan dengan karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris BPR DATAGITA MUSTIKA, sehingga pelaksanaan pekerjaannya independen.

Memenuhi standar professional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

KAP ini telah berpengalaman mengaudit beberapa BPR dan Perusahaan Jasa Keuangan (PJK) lainnya.

2.5. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian Intern

Dalam menerapkan Manajemen Risiko bank telah memiliki kebijakan berupa surat keputusan direksi dalam penetapan limit resiko yang secara periodik dikaji oleh Direksi dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko pada setiap lini bisnis BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko.

2.6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BMPK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan
2. Dana kepada pihak terkait.
3. Bank sudah memenuhi ketentuan mengenai BMPK.
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait disetujui oleh Dewan Komisaris.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait posisi Desember 2023 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	7	Rp. 288.802.195,-
2	Kelompok Peminjam	0	

2.7. Rencana Strategis Bank

2.7.1. Rencana Jangka Pendek

Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Jangka Pendek yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan Visi Misi BPR, Rencana Bisnis telah disusun secara realitas, komprehensif, terukur serta memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

A. Peningkatan Laba

Peningkatan laba akan dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

i. Penyaluran Kredit yang Aman

mempertimbangkan isu Ekonomi tahun 2024 melihat tiga isu penting yang kemungkinan akan pertama mengenai isu perlambatan ekonomi, isu mengenai suku bunga tinggi, dan yang ketiga isu mengenai geopolitik yang kita tidak mengharapkan bahwa isu krisis geopolitik itu akan melebar di Timur Tengah. Isu pertumbuhan ekonomi global yang melambat tentunya akan berdampak juga pada neraca perdagangan yang turut mengalami pertumbuhan melambat. Isu nilai tukar, karena suku bunga acuan globalnya terus, kapan terminal rate-nya akan terjadi suku bunga the federal Reserve atau The Fed menjadi perhatian semua orang karena masih ada ketidakpastian yang dipicu dari target inflasi Amerika Serikat dua persen belum terjadi. Kondisi ketegangan geopolitik pun ke depannya diperkirakan masih akan berdampak kepada pasokan minyak, sehingga memicu adanya peningkatan harga.

Depresiasi mata uang berimbas kemana – mana, dunia usaha dan sector riil tertekan kenaikan beban ongkos produksi akibat harga impor bahan baku dan energy yang lebih tinggi. Ongkos produksi yang meningkat itu berdampak pada kenaikan harga barang dipasaran dan mendorong inflasi akibat impor (imported inflation).

Adapun, di dalam negeri sendiri terdapat tantangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu adanya tahun pemilihan umum atau tahun politik di 2024. Di momen ini dana pengeluaran atau spending dapat keluar lebih besar dan cepat. Dampak lanjutan di tahun pemilu, tentunya kita tidak bisa mengharapkan investasi yang akan datang lebih tinggi, pasti akan melambat, semua orang akan wait and see.

Berdasarkan kondisi ekonomi tersebut diatas BPR dalam menyalurkan kreditnya melihat situasi ekonomi yang terjadi untuk meminimalisir risiko yang akan dihadapi.

Pemanfaatan teknologi informasi salah satu strategi yang akan digunakan BPR dalam menyalurkan kreditnya. Dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui media online diharapkan penyaluran kredit akan meningkat.

Kredit yang diberikan berupa kredit konsumtif multiguna kepada karyawan dengan penghasilan tetap pada perusahaan yang sudah establish sehat, serta kredit modal kerja untuk sektor terpilih dan establish.

Selain itu BPR akan mencari pangsa pasar untuk melakukan pembiayaan untuk daerah yang memiliki *multiplier effect* (daya ungkit tinggi) terhadap perekonomian.

Penyaluran kredit tetap mengutamakan prinsip prudent banking dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang akan dihadapi.

ii. Efisiensi Biaya

Efisiensi biaya terkait dengan biaya operasional sebagai biaya yang terjadi dalam proses operasional BPR. Efisiensi akan dilakukan dengan mengefektifkan sumber daya yang ada, menekan kegiatan operasional yang tidak menghasilkan laba.

B. Penyelesaian NPL

Permasalahan NPL menjadi konsentrasi utama BPR dalam rencana strategis jangka pendek. BPR sudah menyiapkan strategi – strategi dalam penyelesaian masalah NPL tersebut, diantaranya adalah mengappraisal kembali nilai agunan yang menjadi nasabah NPL guna mengurangi beban nilai PPAP yang harus dibentuk, bekerja sama dengan pihak ketiga/Konsultan Hukum terkait penyelesaian NPL yang masih belum dapat diatasi oleh BPR untuk selanjutnya BPR akan melakukan Gugatan Sederhana melalui Pengadilan Negeri Cibinong jika pendekatan melalui pihak ketiga belum dapat dilakukan, dan hal terakhir yang akan BPR lakukan adalah dengan melakukan Hapus Buku.

2.7.2. Rencana Jangka Menengah & Rencana Jangka Panjang

BPR telah menyusun pembuatan Rencana Bisnis untuk jangka menengah 3 dan 5 tahun, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis BPR.

Untuk rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang BPR memiliki langkah – langkah sebagai berikut :

A. Pemenuhan Modal Inti Minimum

Pemenuhan modal inti minimum tahun 2023 merupakan tahap ke V (lima) dan merupakan tahap terakhir dalam pemenuhan Modal Inti Minimum dengan jumlah setoran sebesar 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai realisasi dari action plan dalam pemenuhan modal inti minimum. Persetujuan penambahan modal disetor tahap ke IV tahun 2022 dari Otoritas Jasa Keuangan baru BPR terima pada tanggal 26 September 2023. Pemenuhan Modal Inti Minimum tahap ke V (lima) akan direalisasikan pada tahun 2024, hal ini tidak sesuai karena adanya keterlambatan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

B. Mengembangkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam mengembangkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), dalam menetapkan TARIF fungsi bagian kepatuhan, manajemen risiko, dan internal audit memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal kegiatan operasional perusahaan, termasuk memastikan ketersediaan kebijakan dan prosedur yang *up to date* sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Pengembangan produk core business funding dan lending (Inovasi Produk dan layanan)

Blue Ocean Strategy (BOS) merupakan sebuah proses management strategic yang mampu mengubah paradigma pelaku bisnis dalam menghadapi persaingan khususnya persaingan pasar. Pasar yang bebas dari persaingan disebut Blue Ocean sementara yang sarat dengan persaingan disebut Red Ocean (Kim dan Mauborgne 2005). Analisis BOS dilakukan untuk mengarahkan bagaimana BPR dapat menguasai ruang pasar yang tidak diperebutkan sehingga persaingan menjadi tidak relevan lagi. Penerapan Blue Ocean Strategy dilakukan dengan Kerangka Kerja Empat Langkah, yaitu: hapuskan (eliminate), kurangi (reduce), tingkatkan (raise), dan ciptakan (create).

Seiring perkembangan BPR untuk jangka menengah senantiasa melakukan pengembangan dan peningkatan skill dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, melalui program pelatihan (training), seminar, workshop, baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Selain itu juga dilakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) pada divisi marketing untuk menunjang produktivitas BPR, hal tersebut dilakukan sesuai perkembangan dan kebutuhan.

2.8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

1. Bank telah menyusun ketentuan tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Perlindungan Konsumen.
2. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan sesuai ketentuan dan nantinya akan disajikan pada papan pengumuman publikasi PT. BPR Datagita Mustika.
4. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu di papan pengumuman publikasi BPR.

BAB III
TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

3.1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris memiliki persentase kepemilikan sebesar 50,00% sedangkan Direksi PT. BPR Datagita Mustika tidak memiliki kepemilikan saham. Namun Dewan Komisaris memiliki saham pada Perusahaan lain.

3.2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

1. Komisaris Utama PT. BPR Datagita Mustika memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Bank.
2. Komisaris Utama PT. BPR Datagita Mustika, tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya dan direksi.
3. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Datagita Mustika tidak memiliki hubungan keuangan.

b. Hubungan Keluarga

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham.

3.3. Paket atau kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura seperti gaji, tunjangan tetap, bonus, tunjangan THR, dan tunjangan tetap lainnya selama tahun 2023 sebesar Rp. 461.745.935,- sedangkan dalam bentuk natura tidak ada diberikan fasilitas, terlihat pada tabel berikut ini, Sedangkan dalam bentuk natura tidak ada diberikan fasilitas, terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi & Tunjangan Lain	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya)	2	131.500.000,-	2	438.116.472.-
Fasilitas lain dalam bentuk natura (fas.Tidak tetap lainnya, perumahan, transportasi, asuransi, dll) yang tidak dapat diuangkan	2	0	1	23.629.463,-

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Diatas Rp. 2 miliar	-	-
Diatas Rp. 1 Miliar s.d 2 Miliar	-	-
Diatas Rp. 500Juta s.d 1 Miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	2	2

3.4. *Share Option*

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

3.5. **Rasio gaji Tertinggi dan Terendah**

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah: 1,43
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah: 2,31
- c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah: 1,11
- d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi: 4,32
- e. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi: 5,34

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji/ bulan Posisi Desember 2023		Rasio (x)
		Tinggi	Rendah	
1	Komisaris yang tertinggi dan Terendah	5.500	5.000	1,11
2	Direksi yang tertinggi dan terendah	23.778	10.287	2,31
3	Pegawai yang tertinggi dan terendah	4.445	3.098	1,43
4	Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	23.778	5.500	4,32
5	Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	23.778	4.445	5,34

Rp. 000,-

3.6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 2X selama tahun 2023.

3.7. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Tidak ada penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh pengurus dan atau para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR D a t a g i t a M u s t i k a selama tahun 2023.

Internal	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:							
	Direks		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak	
Dalam 1 (satu) Tahun	Tahun	Tahun Lapora	Tahun	Tahun Lapora	Tahun	Tahun Lapora	Tahun	Tahun Lapora
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Tela h	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Dalam Proses Penyelesaian	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum Diupayakan	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Tela h Ditindaklanjuti	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

3.8. Permasalahan Hukum

Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Datagita Mustika, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpananan dana masyarakat.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Selesai (telah mempunyai ketetapan Hukum)	nihil	nihil
Dalam proses Penyelesaian	nihil	nihil
Total	nihil	nihil

3.9. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan dikarenakan bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada pengurus bank dan atau kalangan Pegawai Bank.

3.10. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

- A. Pemberian dana sosial dan bantuan sosial kepada pihak- pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR Datagita Mustika selama tahun 2023 antara lain adalah :
- Tidak ada pemberian dana social dan bantuan social kepada pihak tertentu selama tahun 2023.
- B. Tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Datagita Mustika.

BAB IV

KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 1 (satu) atau “sangat baik”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan, namun masih ada beberapa yang belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Otoritas Jasa keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.
3. Bank telah membuat SOP *Good Corporate Governance* (GCG), diharapkan kedepan tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bank telah membuat pembagian tugas Direksi yang ditetapkan, sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
5. Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan rekomendasi Komisaris kepada Direksi.
6. Telah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Managemen Risiko dan Fungsi Audit Intern, Fungsi Operasional, Fungsi Kredit diharapkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) kedepan akan lebih fokus dan terarah.
7. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
8. Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari internal maupun dari sisi eksternal seperti debitur atau nasabah BPR.
9. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan.
10. Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Jangka Pendek yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan Visi Misi BPR.
11. Bank telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa keuangan atau lembaga lain yang terkait dalam rangka Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 25 Januari 2024
PT BPR Datagita Mustika

SISWANTO
Direktur Utama

MIA HERMALIANA
Direktur

Mengetahui

MEILA DHARMAYANTI
Komisaris Utama